

MENGAIL DI AIR KERUH: GERAKAN PKI DI SULAWESI SELATAN 1950-1965

*ANGLING THE TURBID WATER:
PKI MOVEMENT IN SOUTH SULAWESI 1950-1965*

Taufik Ahmad

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
Jl. Sultan Alauddin Km 7 Makassar, Tlp/Fax 0411 865166
e-mail: taufik_mukarrama@yahoo.com

Naskah Diterima: 26 Februari 2014

Naskah Direvisi: 19 Maret 2014

Naskah Disetujui: 28 April 2014

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan gerakan PKI di Sulawesi Selatan tahun 1950 sampai 1965. Pokok persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika gerakan PKI di tengah buruknya situasi politik dan keamanan regional? Apakah terdapat interelasi hubungan yang dinamis dan saling memberi pengaruh antara PKI dengan kelompok politik lainnya? Bagaimana PKI mengimbangi kekuatan-kekuatan lokal sehingga mampu bertahan sebelum kehancurannya tahun 1965? Penelitian ini penting untuk melihat perubahan dan hubungan kekuasaan di tengah dinamika politik di daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah kritis dengan melakukan analisis sumber dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa munculnya pemberontakan DT/II Kahar Muzakkar dan Permesta memengaruhi ritme gerakan PKI. PKI tidak dapat mengembangkan organisasinya di daerah pedalaman karena penetrasi DI/TII di daerah pedalaman menyebarkan agitasi bahwa PKI anti agama. Sementara di daerah kota, PKI mendapat tantangan dari militer dan elit birokrat yang umumnya dikuasai oleh bangsawan. Akibatnya, PKI gagal mendapatkan dukungan di Sulawesi Selatan pada pemilu 1955. Setelah DI/TII dan Permesta ditumpas gerakan PKI berkembang pesat dan mendapat dukungan luas dari para petani. Terdapat interelasi hubungan yang dinamis, berfluktuatif, saling memberi pengaruh antara PKI dengan kelompok politik lain dari satu periode ke periode lainnya.

Kata kunci: Gerakan PKI, Keamanan Regional, Sulawesi Selatan.

Abstract

This article is intended to explain PKI movement in South Sulawesi in 1950 – 1965. The main subject in this research is to know how the dynamics of the movement of the PKI in the middle of the bad political situation and regional security. Is there any dynamic interrelation relationship and mutual influence between the PKI with other political group? How does PKI offset local forces so that they can withstand before its destruction in 1965? This research is important to overview the changes and the power relations in the middle of dynamics politics of South Sulawesi. The research method that is used in this research is critical history method with doing documentation source analysis and in depth interview. The result found that the rebellion of DT/II of Kahar Muzakkar and Permesta affected the rhythm of PKI movement. PKI could not evolve the organization in rural areas because of the penetration of DI / TII in the countryside that was spreading anti-religious agitation of PKI. Meanwhile in the city, PKI got challenged from the military and elite bureaucrats who were generally dominated by nobles. As a result, PKI failed to gain support in the South Sulawesi in 1955 elections. After DI / TII and Permesta exterminated,

the PKI movement was growing rapidly and had a wide support from the peasants. There is a dynamic relationship interrelation, fluctuating, mutual influence between PKI with other political groups from one period to another period.

Keywords: PKI movement, Regional security, South Sulawesi.

A. PENDAHULUAN

Sebuah artikel dalam *Harian Rakyat* menyatakan bahwa “tahun 1958 Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah yang terus menerus dalam pemberontakan” (*Harian Rakyat*, 10 September 1958 dalam Velthoen, 2011). Pemberontakan Andi Aziz yang bermula dari insiden bulan Mei 1950 ketika ia menolak pendaratan pasukan dari Jawa di Makassar, kemudian gerakan Andi Selle di wilayah Toraja dan Mandar yang mengakibatkan pertempuran dengan Kodam XIV Hasanuddin, dan yang berlangsung paling lama dan paling memengaruhi situasi politik, sosial dan ekonomi adalah pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar dan Permesta. Kedua pemberontakan ini memiliki visi yang sama, yaitu menghilangkan pengaruh komunis di Sulawesi Selatan (Ahmad, 2009: 45, 2012:157). Keduanya pun benar-benar menyita perhatian, ekonomi dan energi pemerintah pusat dalam penumpasannya. Pertempuran yang berlarut-larut menyebabkan terjadinya militerisasi kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh Sulawesi Selatan dan militerisasi politik, yang sangat menghalangi perkembangan politik ‘sipil’ (Velthoen, 2011). Pada periode ini Sulawesi Selatan dapat disebut sebagai daerah dinamis dan bergolak.

Lalu, bagaimana dengan gerakan komunis di tengah dinamisasi dan pergolakan politik serta rapuhnya situasi keamanan regional Sulawesi Selatan pada periode dinamis dan bergolak tersebut? Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI mencoba menghilangkan kesan buruk akibat peristiwa Madiun 1948, dengan memanfaatkan hak untuk tampil legal dalam konstelasi politik, PKI berusaha menemukan ritmenya di Sulawesi Selatan.

Namun tidak hanya berhadapan dengan gerakan DI/TII Kahar Muzakkar dan Permesta yang secara nyata mengumandangkan dirinya sebagai anti Komunis, tetapi PKI pun harus dirumitkan oleh hubungan primordial dan konflik etnis yang telah berakar dalam sejarah daerah ini. Artikel ini mencoba melihat gerakan PKI sebagai fokus kajian melalui latar dinamika dan pergolakan di Sulawesi Selatan. Ini dimaksudkan untuk memperlihatkan dan mengeksplorasi cara-cara baru dalam memandang daerah pada tahun 1950-an dengan meletakkan PKI sebagai fokus, sebuah komunitas yang banyak dihujat dan diterlantarkan.

Studi tentang politik lokal Sulawesi Selatan tahun 1950-60-an dari berbagai perspektif telah banyak dilakukan. Barbara Sillars Harvey (1983), dengan kajian politik, ia mencoba menelusuri peristiwa Permesta dengan memakai teori “*Center Periphery*”. Teori ini berusaha melihat faktor lemahnya integrasi birokratis dan ekonomis yang merupakan warisan dari kondisi umum zaman penjajahan, menjadi unsur pokok yang menimbulkan ketegangan pusat dengan daerah. Kendatipun studi ini melihat gerakan Permesta, tetapi di dalamnya mencakup dinamika lokal dan pertarungan politik di mana PKI menjadi bagian penting di dalamnya. Studi kedua dari Barbara Sillars Harvey (1989) yang menyoroti gerakan DI/TII Kahar Muzakkar. Studi ini mengupas secara detail dinamika regional Sulawesi Selatan menjelang dan berakhirnya Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar. Kedua studi Barbara Sillars Harvey memberikan informasi penting tentang dinamika politik di Sulawesi Selatan

Kemudian hasil penelitian R.Z. Lerrisa (1997) yang kemudian diterbitkan

dengan judul “PRRI/Permesta”: *Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*” memberi persepsi bahwa salah satu tujuan utama gerakan Permesta upaya menyusun strategi pembangunan berskala nasional tanpa keterlibatan PKI dalam kegiatan politik nasional. Studi ini memberi ruang penjelasan lebih banyak tentang pergulatan para tokoh Permesta dalam membendung pengaruh komunisme di Sulawesi Selatan.

Pergulatan PKI dalam politik lokal juga dapat ditemui dalam studi Anhar Gonggong (1994) *Kahar Muzakkar: Dari Patriot ke Pemberontak*. Kendatipun studi ini melihat Kahar Muzakkar sebagai fokus kajian, akan tetapi di dalamnya terdapat pertarungan politik antara PKI dengan DI/TII Kahar Muzakkar dalam berebut pengaruh di Sulawesi Selatan. DI/TII menyebarkan agitasi politik di daerah pedalaman bahwa PKI anti agama, sementara PKI berusaha menyerang DI/TII sebagai gerakan separatis pemberontak. Kemudian studi William Bigalke (2005) menjelaskan secara detail mengenai dukungan militer, Batalyon Diponegoro yang sedang bertugas dalam penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar, pada pengembangan PKI melalui Barisan Tani Indonesia yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat di wilayah Toraja. Studi ini memberi penjelasan detail tentang situasi politik di Toraja tahun 1950an.

Kemudian hasil penelitian Taufik Ahmad (2009) yang secara khusus melihat tahanan politik PKI di daerah Moncongloe Sulawesi Selatan. Ia mencoba memulai studinya dengan melihat bahwa konflik politik sampai pada kekerasan terhadap simpatisan PKI tahun 1965 di Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari konflik yang telah mengakar di Sulawesi Selatan. Gerakan PKI di Sulawesi Selatan dihadapkan pada dominasi militer dan bangsawan yang telah lama mengakar di daerah ini. Studi ini memberikan informasi penting seputar konflik politik di Sulawesi Selatan tahun 1950 - 60-an.

Berbagai studi di atas membantu manajamkan analisis pergulatan PKI di tengah dinamika politik lokal Sulawesi Selatan. Sebagai studi sejarah yang menekankan pada proses dan perubahan, maka ada dua pokok bahasan akan diuraikan dalam artikel ini, *pertama*, menyangkut konteks Sulawesi Selatan dengan segala aspeknya yang dapat memengaruhi eksistensi gerakan komunis, meliputi; politik keamanan regional. Kontes ini penting untuk melihat trayektori yang fluktuatif perkembangan PKI di Sulawesi Selatan. *Kedua*, menelaah sepaik terjang gerakan PKI di Sulawesi Selatan, dimulai meretas jalan politik di Sulawesi Selatan, strategi merebut pengaruh menjelang pemilu tahun 1955 sampai pada perjuangan *land reform* berujung munculnya aksi sepihak PKI mengokupasi tanah untuk dibagikan kepada petani sebagaimana amanat UUPA. Sikap politik PKI ini justru mendorong munculnya sikap antipati terhadap PKI itu sendiri. Upaya PKI memperjuangkan hak tanah untuk petani mengakibatkan pertentangan antara PKI dengan elit lokal yang pada akhirnya menjadi nyata melalui konflik dan kekerasan yang lebih nyata terjadi di Sulawesi Selatan setelah Gerakan 30 September 1965.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab persoalan di atas diperlukan analisis sejarah kritis yang mengkonstruksi kembali kejadian masa lalu melalui metode kerja yang sistematis dari ilmu sejarah. Seperangkat asas dan kaidah sistematis yang diubah untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan dalam bentuk narasi sejarah.

Penelusuran awal data penelitian ini menggunakan studi arsip dan kepustakaan (*library research*). Kemudian pengumpulan sumber primer berupa arsip-arsip yang berhubungan dengan gerakan PKI di Sulawesi Selatan dan wawancara mendalam terhadap pelaku sejarah.

Sumber primer berupa arsip yang digunakan adalah dokumen-dokumen pemerintah pada periode 1950 sampai 1960-an. Kemudian wawancara mendalam juga dilakukan terhadap saksi-saksi sejarah, antara lain aktivis PKI, Lekra, dan Pemuda Rakyat serta dari organisasi lainnya. Sumber yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan kritik sumber. Setelah kritik sumber, dilakukan interpretasi data. Data yang telah diinterpretasi menjadi kumpulan fakta sejarah kemudian direkonstruksi menjadi narasi sejarah gerakan PKI di tengah dinamika politik regional Sulawesi Selatan

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Politik Keamanan Regional

Rentang tahun 1950–1962, dalam sejarah Sulawesi Selatan, terdapat dua peristiwa politik yang penting dan menonjol serta berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan. *Pertama*, Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar (1950-1962), dan *kedua*, Gerakan Permesta yang dipelopori oleh perwira militer di Sulawesi Selatan (1957-1962). Perbedaan menyolok dari kedua gerakan ini terletak pada ideologi dan strategi perjuangannya. DI/TII Kahar Muzakkar secara tegas menyatakan diri sebagai gerakan yang berideologi Islam sebagai landasan perjuangannya. Gerakan DI/TII terfokus di daerah pedalaman. Sedangkan Permesta adalah sebuah gerakan yang dipelopori perwira militer yang menawarkan suatu format pembangunan daerah dan menuntut otonomi. Ada suatu kekecewaan perwira daerah di Sulawesi Selatan terhadap kegagalan pusat dalam berbagai bidang pembangunan. Gerakan ini berpusat di Makassar kemudian berkembang ke Minahasa. Namun, baik gerakan DI/TII maupun Permesta keduanya memiliki kesamaan visi yaitu menghilangkan pengaruh komunis di Sulawesi Selatan. (Hamid, 2008: 29).

Sejak awal, Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar telah mendapat perhatian dari beberapa aliran politik di Sulawesi Selatan. “Tidak jelas berapa lama setelah Kahar Muzakkar memulai pemberontakannya – pelariannya ke hutan bulan Juli 1950 – ia dihubungi oleh wakil-wakil dari perwujudan organisasi komunis dan Islam militan”. (Harvey, 1989: 196). Tidak jelas maksud kedua kubu yang berbeda ini menghubungi Kahar Muzakkar. Yang jelas Ny. Salawati Daud melakukan pendekatan-pendekatan kepada Kahar Muzakkar dan mengirim dua orang anggotanya keturunan Cina dan Jawa untuk mencoba memengaruhi Kahar Muzakkar (Gonggong, 2004: 308). Demikian halnya Masyumi dan DI melakukan pendekatan serupa.

Nampaknya PKI berusaha mendekati Kahar Muzakkar dengan maksud memengaruhi sikap politiknya. Hal serupa juga dilakukan tokoh Islam, utamanya dari Masyumi justru kemudian menjadi sandungan bagi perkembangan Masyumi itu sendiri setelah mendapat tuduhan mendukung gerakan DI/TII Kahar Muzakkar. Masyumi sebagai partai Islam memang merupakan sasaran yang sangat sering menerima tuduhan sebagai “membantu” gerakan DI/TII di basis-basis pendukung terkuat partai ini. Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan memang merupakan daerah kekuatan partai-partai Islam, khususnya Masyumi sebagai salah satu partai “terbanyak” pendukungnya menjadi sasaran PKI sebagai partai anti gerakan daerah. Bahkan PKI demikian gencar menyerang Masyumi dengan melontarkan isu bahwa gerakan DI/TII merupakan instruksi Natsir, pemimpin tertinggi Masyumi ketika itu. Nampaknya PKI menempuh strategi tepat untuk menjatuhkan tokoh-tokoh partai Islam di daerah. Kritik PKI utamanya terhadap tokoh-tokoh politik militer yang dianggap mengedepankan sikap kedaerahan.

Pernyataan politik PKI menyudutkan partai-partai Islam adalah

suatu bentuk perjuangan partai ini pada tingkat elit pemerintahan dengan cara menyerang lawan-lawan politiknya (*Harian Rakyat*, 21 September 1954). Di daerah pedalaman Sulawesi Selatan justru berkembang sebaliknya. Aktivistis-aktivis Gerakan DI/TII melakukan propaganda tentang orang-orang Jawa dengan menyebut mereka sebagai orang komunis, kafir atau tidak beragama. "Mereka juga menggunakan istilah "Djawa pendjadjah" dan "Anti Djawa". (Muzakkar, 1999: 14). Propaganda ini memperburuk citra PKI di mata rakyat setempat yang dianggap sebagai golongan tidak bertuhan (*atheis*). (Arsip Pemerintah Sulawesi Reg. 714). Keadaan ini memperlihatkan antara PKI dan DI/TII Kahar Muzakkar saling serang di arena masing-masing. Kalau di daerah pedalaman DI/TII Kahar Muzakkar melancarkan serangan terhadap PKI, di daerah Kota Makassar justru PKI berusaha merebut opini publik dan mengkampanyekan DI/TII Kahar Muzakkar sebagai gerakan separatis.

Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar juga menimbulkan "kekacauan" dalam bidang pemerintahan. Roda pemerintahan semakin sulit dijalankan dengan baik, karena suatu daerah tidak sepenuhnya berada di bawah pemerintahan RI, melainkan juga berada di bawah kekuasaan pasukan DI/TII. Suatu daerah yang terdiri atas sekian distrik, mungkin akan terbagi distrik yang satu dikuasai oleh TNI, sedangkan yang lainnya *de facto* dikuasai oleh DI/TII. Sebagai contoh, daerah Sinjai yang terbagi atas 5 distrik, ternyata 3 distrik sepenuhnya searah *de facto* dikuasai oleh DI/TII. Demikian pula daerah-daerah lainnya yang memang merupakan pusat kekuatan DI/TII seperti Palopo, Bone dan Mandar. (Gonggong, 2004: 404). Basis-basis kekuasaan DI/TII Kahar Muzakkar merupakan wilayah-wilayah yang nyaris tidak tersentuh pengaruh PKI. Demikian pula di wilayah inilah tumbuh subur anggapan bahwa PKI adalah kafir, perampok serta segala label buruk di dalamnya.

Penguasaan wilayah-wilayah tertentu oleh DI/TII dan operasi militer TNI dalam penumpasannya menjadikan daerah yang didiami oleh penduduk dalam keadaan tidak aman. Rakyat sering kali berpindah-pindah tempat, bahkan terkadang harus membuka pemukiman baru demi mencari rasa aman. Oleh karena itu, selain berefek pada roda pemerintahan, eksistensi Gerakan DI/TII itu juga memengaruhi perubahan struktur pemukiman. Seperti, munculnya pemukiman-pemukiman baru atau adanya perpindahan penduduk secara besar-besaran sehingga membentuk kampung-kampung baru. Penduduk sipil harus berpindah-pindah menghindari efek negatif dari pertempuran DI/TII dengan TNI.

Selain DI/TII Kahar Muzakkar, gerakan Permesta juga memengaruhi perkembangan politik di Sulawesi Selatan. Gerakan ini berawal dari tuntutan dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut pemberian otonomi kepada daerah. Ada kekecewaan daerah terhadap pusat yang berkenaan dengan konflik politik-ideologi di pusat, korupsi merajalela, dan kegagalan pembangunan ekonomi. (Leirissa, 1997) Akumulasi kekecewaan ini merebak tuntutan otonomi di daerah Sulawesi Selatan. Ketegangan yang terjadi Sulawesi Selatan pada khususnya sehingga para perwira militer mencetuskan Permesta tanggal 2 Maret 1957, dengan terlebih dahulu mengumumkan daerah Sulawesi Selatan dalam keadaan darurat (SOB), sehingga diberlakukan pemerintahan darurat militer. (Arsip Saleh Lahade Reg. 232, 266) Langkah pertama yang diambil adalah dibentuk pemerintahan yang terdiri atas unsur sipil yang tergabung dalam Konsentrasi Tenaga dan unsur TNI Staf TT-VII/Wirabuana. Selang beberapa jam kemudian setelah pengumuman SOB dan piagam Permesta tersebut, Letkol Sumual mengeluarkan pengumuman selaku Kepala Pemerintahan Militer dan Wilayah TT-VII/Wirabuana, mengenai organisasi pemerintahan. Pada hari-hari berikutnya

dikeluarkan juga sejumlah surat keputusan mengenai berbagai masalah yang perlu ditangani sesegera mungkin.

Tanggapan PKI terhadap gerakan daerah dapat dilihat pada *Harian Rakjat* yang menunjukkan sikap antipati yang tegas. Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Masjumi dan PSI yang lebih bersimpati. Kaum nasionalis tidak menyukai sentimen daerah ini, namun sikapnya tidak selugas *Harian Rakjat*. Sikap antipati Partai Komunis Indonesia disebabkan anggapan bahwa rasa kedaerahan semata-mata merupakan usaha kaum kolonialis dan imperialis untuk memecah belah Indonesia. Partai ini tampaknya tidak menanggapi penyebab keresahan di daerah dengan serius. Dalam tajuk tanggal 6 Maret 1956 mengenai persoalan daerah, *Harian Rakjat* memasang judul provokatif: *Ratjun Daerahisme* yang berisi kecaman terhadap pemimpin daerah bergolak dan partai-partai berbasis agama yang mendukung gerakan di daerah

Setelah DI/TII dan Permesta berhasil ditumpas oleh TNI, Masyumi dan PSI dibubarkan karena tuduhan mendukung PRRI/Permesta. Kondisi ini memengaruhi konstelasi politik di Sulawesi Selatan. Kegagalan PKI di Sulawesi Selatan dalam menarik simpatik rakyat pada pemilu tahun 1955 tidak lepas dari kuatnya pengaruh Masyumi dan PSI serta propaganda DT/II kepada penduduk pedalaman. Demikian pula PKI juga mendapat sandungan dari perwira militer yang memiliki fungsi sosial politik dominan di daerah ini yang sebagian besar anti PKI. Namun kondisi itu lebih ringan bagi PKI dengan berakhirnya Gerakan DI/TII dan PRRI/Permesta serta pembubaran Masjumi dan PSII.

Pemulihan keamanan dan ketertiban setelah penumpasan DI/TII dimanfaatkan oleh PKI untuk membangun pengaruhnya di daerah pedalaman. Komando Operasi Rehabilitasi Daerah (KOPREDA) yang dibentuk pemerintah daerah bertujuan untuk membangun

kembali daerah-daerah yang mengalami kehancuran akibat Gerakan DI/TII dimanfaatkan oleh PKI untuk menarik dukungan masyarakat. Kasus yang terjadi di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone adalah salah satu wilayah pesisir teluk Bone mendapat bantuan dalam bidang pendidikan, pertanian dan perikanan. Igo Garnida Heri Erianto, sektraris PKI Kabupaten Bone, sekaligus menjabat kepala Jawatan Perikanan Kabupaten Bone membuat dua lembar formulir untuk ditandatangani oleh nelayan yang menerima bantuan. Lembar pertama adalah bukti penerimaan barang dan lembar kedua adalah pernyataan kesediaan menjadi anggota PKI. (Idrus Husein, *Wawancara*, 8 Agustus 2008).

Sulawesi Selatan kemudian dijadikan basis PKI di luar Jawa sebagai langkah awal memanfaatkan kesempatan keleluasaan setelah berakhirnya DI/TII dan Permesta serta Masyumi dan PSII dinyatakan partai terlarang. Pertimbangan lain bahwa, di daerah ini memiliki sumber daya alam yang memadai dan kondisi strategis di Indonesia Timur, namun rakyatnya miskin. Propoganda dapat berjalan dengan baik karena rakyat Sulawesi Selatan terus menerus mengalami penindasan dari kaum feodal. (Berita Acara Persidangan Marcus Girot, 1968)

PKI menggunakan organisasi-organisasi massanya seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI untuk merekrut orang-orang agar tertarik masuk organisasi PKI. Situasi keamanan yang tidak kondusif sepanjang gerakan DI/TII dan Permesta telah mematangkan posisi politik PKI di pentas politik nasional dan akhirnya memuluskan langkah-langkah politik PKI di Sulawesi Selatan setelah kedua gerakan itu ditumpas. Dengan leluasa PKI memperkenalkan jati dirinya sebagai partai populis yang memperjuangkan hak-hak petani.

2. Meretas Jalan Politik

Aktivitas PKI di Sulawesi Selatan mengalami pasang surut seiring

perkembangan politik nasional. Pada saat pemberontakan Madiun 1948, PKI di Sulawesi Selatan tidak menunjukkan aktivitasnya yang menonjol, baru setelah penyerahan kedaulatan 1950, dan melunaknya sikap pemerintah RI, PKI mulai muncul kembali di daerah ini seiring dengan bangkitnya PKI di pentas politik nasional

Gerakan PKI pada dasarnya sempat mati suri ketika Peristiwa di Madiun pada 18 September 1948. Posisi PKI secara organisasi semakin goyah bahkan eksistensinya sudah dibubarkan, walaupun secara *de jure* belum pernah diumumkan oleh pemerintah. Akan tetapi pembicaraan mengenai nasib PKI terus diupayakan, selain itu dalam sidang-sidang kabinet pemerintah secara khusus membicarakan tindakan/langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa seperti di Madiun. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo pada tanggal 4 September 1949 mengeluarkan pernyataan bahwa pelaku yang terlibat dalam peristiwa Madiun 1948 tidak akan dituntut, kecuali bila mereka terlibat tindakan kriminal (Subhan, 1996: 11)

Keputusan tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah RI bersikap toleran dan seakan-akan bangsa Indonesia yang baru merdeka akan menerapkan sistem demokrasi dan mampu menggali berbagai kekuatan partai politik. Hal tersebut menjadikan perjalanan nasib PKI dan kaum komunis pasca peristiwa Madiun menjadi jelas. Terbukti pada tanggal 4 Februari 1950 pemerintah menegaskan kembali bahwa PKI tidak dilarang dengan catatan mau mematuhi hukum dan tata tertib negara. Pernyataan tersebut mengantar PKI kembali ke gelanggang pentas politik nasional dan eksistensi PKI semakin transparan. Di bawah pimpinan D.N. Aidit PKI berusaha bangkit kembali. Dan sejak itu PKI melakukan aktivitas politik di berbagai daerah termasuk di Sulawesi Selatan.

Sampai tahun 1953 gerakan komunis di Sulawesi Selatan masih belum menunjukkan kemajuan berarti. Suatu keadaan yang masih kacau dan belum kondusif. PKI sebagai organisasi sangat mementingkan prinsip-prinsip ideologis.

Berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan itu, kaum komunis di Sulawesi Selatan lebih suka menggunakan konsep mengenai kesengsaraan yang meningkat (*In Creasing Misery*) yang menempatkan kapitalis diidentikkan dengan pemerintah dan kolonial sebagai faktor penyebab dari segala bentuk kesengsaraan menimpa nasib buruk rakyat. Aktivis komunis melakukan percobaan untuk mengintesakan antara faham Komunis dengan agama Islam dan Nasional. Langkah-langkah yang ditempuh ini mencoba mengalihkan isu yang dilancarkan Gerakan DI/TII di pedesaan bahwa PKI adalah kafir. Dengan langkah ini diharapkan minimal masyarakat dapat melihat ideologi komunis sebagai jalan politik pembebas dari kemiskinan dan dapat meningkatkan masyarakat petani. (Tinjauan Sudisman CC PKI dalam Arsip Saleh Lahade, Reg. 259)

Berkembangnya isu bernuansa politis-ideologis bahwa PKI adalah partai anti agama mendorong aktivis PKI untuk melakukan klarifikasi tentang PKI dan orientasi ideologinya yang menurutnya salah dipahami oleh masyarakat. PKI melakukan pertemuan-pertemuan untuk menjelaskan tentang PKI sebagai sebuah partai yang tidak anti agama, tetapi menjunjung dan menghargai ajaran agama. Dalam suatu pertemuan yang diadakan tanggal 3 Juni 1953 di Makassar, menjelaskan bahwa PKI bukanlah anti agama, namun mengusahakan untuk membuat rakyat cinta agama dengan jalan tidak menggabungkan keyakinan dengan politik. PKI berusaha untuk mendapat makanan dan pakaian yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sejalan dengan ajaran Islam saling tolong-menolong dalam kebaikan. PKI berusaha memperjuangkan tanah untuk tani

sebagaimana amanat agama Islam untuk tidak menelantarkan orang miskin. Dalam kesempatan itu pula PKI yang diwakili oleh Karel Supit selaku Provkom daerah Sulawesi-Maluku menjelaskan arti lambang dan Panji Merah Putih dan lambang “palu arit” itu sama halnya dengan partai lainnya yang berlambang banten, bintang, rosario dan obor. Simbol berupa palu arit adalah lambang dari kaum buruh dan tani serta kembang artinya kemakmuran. Karel Supit juga memaparkan tujuan perjuangan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum. (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 236)

PKI mendirikan organisasi-organisasi sebagai wadah mesin politik di daerah. Seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Rakyat, Gerwani, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), Gabungan Organisasi Tani Indonesia (GOTI). Melalui organisasi-organisasi ini PKI memperkuat pengaruhnya, merekrut orang-orang yang tertarik untuk menjadi anggota PKI. Untuk menarik simpatik rakyat, dilakukan pembagian kebutuhan petani, seperti pacul, parang dan sekop. Kemudian menjanjikan kepada petani pembagian tanah gratis. (Arsip Kab. Bone Reg. 1075). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menarik simpati rakyat, di antaranya; pesta rakyat di Kelurahan Pa'baeng-baeng dan Sungguminasa, perlombaan kesenian dan olahraga dengan menampilkan simbol-simbol PKI. (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 238).

Di beberapa daerah, utamanya Luwu, Pare-Pare, dan Makassar PKI beserta ormas-ormasnya mampu menarik massa yang cukup besar melalui konsep pembagian tanah dan alat-alat pertanian secara gratis. Gerakan turun ke bawah yang dilakukan oleh PKI menunjukkan hasil yang nyata. Pada tahun 1953 berhasil menyatukan visi dan gerakan dari Rukun Tani Indonesia (RTI), Barisan Tani

Indonesia (BTI,) Sarekat Kaum Tani Indonesia (SAKTI) dan Pemuda Rakyat dengan tetap memakai atas nama BTI. Kemampuan menyatukan itu didasarkan atas hasil penelitian dan membenarkan tentang pertentangan antara kaum miskin atau buruh tani dengan kapitalis desa dan tuan tanah. Oleh karena itu, BTI semakin gencar menyarankan dan menjanjikan agar *land reform* diadakan dalam masyarakat desa. (Arsip Provinsi Sulawesi, Reg. 344) Hingga akhir tahun 1953 telah ada aktifitas yang dilakukan oleh gerakan PKI yang terorganisir melalui Seksi Komite (SK) dengan memberikan gambaran umum mengenai kondisi yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam setiap kegiatan yang dipelopori oleh SK PKI yang membawa nama buruh, tani, pemuda/pelajar, wanita, pengusaha kecil, pedagang, para seniman, ahli budaya, wartawan dan golongan tertentu. Ajaran komunis di Sulawesi Selatan mulai dikenal oleh sebagian masyarakat dalam bentuk ajaran “Marhaen” (Arsip Kodya Ujung Pandang, Reg. 194)

Pada tanggal 7 Januari 1954 SK PKI Sulawesi Selatan diubah menjadi menjadi Central Komite (CK) PKI untuk wilayah Sulawesi dan Maluku berpusat di Makassar. Perubahan bentuk ini dimaksudkan agar gerakan PKI dapat lebih dikonsentrasikan dalam upaya merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Susunan pengurus, yakni, Karel Supit sebagai ketua, Mohammad Junus sebagai wakil ketua, Anwar Kadir sebagai sekretaris dan Aminuddin Muhlis sebagai wakilnya. Sekretariat Seksi Komite PKI ini beralamat di Jalan Hadji Sapiah No. 5 Makassar, rumah kediaman Paiso. (Harvey, 1983: 197). Sejak itu, gerakan PKI di Sulawesi Selatan semakin intensif melakukan kegiatan-kegiatan politiknya, meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu strategi yang diterapkan dalam menyebarkan pengaruhnya adalah memanfaatkan orang Tionghoa yang didatangkan dari luar wilayah Sulawesi Selatan.

Kursus-kursus yang pernah diadakan CC PKI yaitu pada tanggal 8 Juli 1962, khusus mengenai sosial politik di Kampung Panampu yang diselenggarakan pada tengah malam dimulai pada pukul 21.00 sampai selesai. Buku pengajaran yang digunakan dengan judul ABC Politik cetakan ke-2 yang disempurnakan dan buku bacaan komunis yang berjudul "Revolusi Rusia sampai Yalto", "Azimat Revolusi", disebarikan secara gratis kepada anggota dan pemuda rakyat. PKI memberi kesempatan kepada anggota untuk mempelajari Marx, Engels, Lenin dan Stalin. Kemudian, dilakukan kajian isu-isu sosial politik yang berkembang saat itu, tidak jarang memaparkan kritik kepada kaum kapitalis dan imperialis juga tuan tanah yang menindas kelas buruh dan petani. Demikian pula kecaman kepada pejabat-pejabat yang korup serta ketimpangan-ketimpangan sosial lainnya. Selain itu PKI dibawah BTI memberikan pendidikan petani khususnya pemberantasan buta huruf. Disetiap CS mengadakan ceramah untuk pengembangan organisasi, terutama Pemuda Rakyat dan Gerwani. Setiap jenjang struktur organisasi PKI seperti CC, harus mendirikan sekolah Badan Pendidikan Rakyat (BDR) yang setingkat SMP, Panitia Pendidikan Rakyat (PPR) setingkat SD, mengadakan kursus minimal 16 kali dalam 4 tahun dan mengadakan *koor* atau nyanyi bersama yang beranggotakan minimal 25 orang dan tiap-tiap anggota harus bebas buta huruf. (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 33)

Aktivis PKI juga melakukan propaganda pada masyarakat petani, buruh dan melebarkan pengaruhnya dalam tubuh militer. Pucuk pimpinan langsung dari seksi militer CC PKI mengintruksikan kepada tiap-tiap *sub comite* untuk membentuk tentara buruh rakyat. Setiap buruh (SOBSI) memilih kader tentara yang sungguh-sungguh dapat dipercaya atau dapat menyimpan rahasia. Pengaruh kader SOBSI dalam dalam tubuh SBKP (Serikan Buruh Kementerian Pertahanan) terlihat

pada Kongres I SBKP pada tanggal 10 April sampai dengan 16 April 1953 di Surabaya. Utusan Serikat Buruh Angkatan Perang (SBAP) asal Makassar adalah J.C. Rumbajan dan Shaidi. Keduanya mengikuti kongres itu dari awal sampai akhir. Dalam sidang-sidang kongres tersebut, beberapa agenda sidang membicarakan masalah gerakan buruh SOBSI sebagai gerakan buruh dibawah kontrol internasional, dan SBKP, nampak ada persetujuan antara SBKP dan SOBSI untuk berebut pengaruh atas SBAP. Dalam tubuh SBAP sendiri terdapat berbagai organisasi-organisasi pergerakan buruh, baik dari SOBSI, SBKP, dan wakil-wakil dari instansi militer/sipil, AURI, Gerwis, Invaliden, PKI, Pemuda dan Rakyat (Arsip Saleh Lahade Reg. 260).

3. PKI Pasca Pemilu 1955

Sukses PKI dalam perolehan hasil pemilihan DPR secara nasional ternyata tidak merealitas di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Tengah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu 1955; Masyumi sebesar 41, 16 persen, PNI sebesar 8, 06 persen, PSSI sebesar 1, 11 persen, Partai Katolik 0.56 persen, NU 0.55 persen, Parkindo 0.55 persen; PSI 0, 41 persen, PKI 0,25 persen, dan PKR 0, 06 persen. Dari perolehan itu nampak bahwa partai-partai ideologi Islam yang paling berhasil merebut hati masyarakat di daerah Sulawesi Selatan. Kemudian untuk wilayah pemilihan Sulawesi Selatan dan Tenggara PKI menempati posisi ke-10 dengan jumlah suara 17.831 atau 1,6 persen, sedangkan suara yang diperoleh PKI untuk wilayah Makassar mencakup Maros sebesar 5,77 persen sehingga PKI tidak mendapat kursi di dewan legislatif untuk 14 kursi yang diperebutkan. (Arsip Saleh Lahade, 2445, Harvey, 1983: 42).

Kegagalan PKI dalam pemilu 1955 di Sulawesi Selatan dan Tenggara disebabkan karena PKI tidak dapat bergerak leluasa di daerah pedalaman sebagai akibat penetrasi DI/TII yang begitu kuat yang menyebarkan isu "PKI adalah

anti agama". Sementara di jajaran pemerintahan kekuatan koalisi militer dan bangsawan yang menguasai birokrasi di daerah perkotaan juga menghambat pengaruh komunis.

Setelah Pemilu tahun 1955, PKI sudah mulai melakukan perjuangan menuju tangga kekuasaan melalui jalan konstitusional. Di samping tetap melakukan gerakan di bawah tanah dengan penyusupan dalam berbagai elemen masyarakat dan negara, PKI juga memaksimalkan usahanya untuk berebut pengaruh dalam pentas politik nasional. Dengan pendekatan-pendekatan dukungan terhadap revolusi yang didengungkan Sukarno dan adanya persamaan-persamaan cara pandang PKI dengan Sukarno terhadap nekolim, disertai konsistensinya dalam memperjuangkan petani dan buruh secara tegas mengantarkan dirinya menjadi kekuatan yang diperhitungkan di panggung politik nasional.

Dalam pentas politik nasional, PKI berhasil merebut simpati politik Presiden Sukarno, namun gagal merebut simpati elit-elit lokal di Sulawesi Selatan. Pencetusan Permesta dimana perwira-perwira pencetusnya adalah orang-orang yang anti komunis, merupakan rintangan berat bagi PKI untuk melebarkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Beratnya menghadapi agitasi DI/TII di daerah pedalaman menjelang pemilu tahun 1955, saingan dengan Masyumi semakin kuat berdasarkan hasil pemilu, ditambah gerakan Permesta yang menolak konsepsi presiden, utamanya dalam hal ide memasukkan PKI dalam kabinet. Paise sebagai wakil PKI menyatakan mundur dari DPP, dan Pemuda Rakyat keluar dari Dewan Pemuda Indonesia Timur. (*Warta Pia*, 14 Maret 1957). Ini memperlihatkan posisi PKI tidak dapat bergerak leluasa untuk memperluas pengaruhnya di Sulawesi Selatan.

Pertarungan politik ditingkat elit tidak mengurangi aktivitas PKI dalam bidang perjuangan bagi kaum buruh dan petani. Sejak pemilu 1955 dan seterusnya

PKI memusatkan kegiatan pengorganisasian "sokoguru revolusi", yakni kaum tani dan kaum buruh, serta sejumlah massa (Ricklefs, 2008: 410). Antara Maret-November 1954 jumlah anggota PKI meningkat tiga kali lipat dari 166.206 orang menjadi 500.000 orang. Pada tahun 1962 mencapai 3,3 juta orang sehingga menjadikan partai komunis terbesar di negara nonkomunis di manapun. Sementara pada saat yang sama PKI berusaha menetralkan kekuatan-kekuatan nonkomunis dengan mendukung pembentukan "front nasional" dan mengangkat slogan-slogan nasionalis. Aksi dijalankan dengan jalan propaganda dan agitasi. Kaum "manipol munafik" mengaku manipolis tetapi mendukung dengan hal-hal yang berbau imprealis dan kapitalisme Inggris dan Amerika Serikat juga. Slogam yang populer tahun 1950-an "Amerika kita setrika" dan "Inggris kita linggis" dimunculkan kembali. (Krisnadi, 2000: 38)

Gerakan propaganda PKI diamati oleh Kodam XIV Hasanuddin sehingga pada bulan Agustus 1960 Panglima Kolonel Inf. M. Jusuf mengambil langkah yang sangat berani yakni melarang semua aktivitas PKI di wilayah yuridiksinya. Hal itu dimaksudkan selain untuk melindungi Sulawesi Selatan dari pengaruh ideologi komunis, juga yang terpenting adalah untuk melunakkan Gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar. Hanya karena tekanan presiden Sukarno, akhirnya larangan terhadap aktivitas PKI dicabut, tetapi dalam kenyataannya dia tetap membatasi gerakan PKI di daerah ini. Akibat tekanan dan pembatasan Panglima Kodam XIV Hasanuddin, PKI tidak dapat berkembang secara maksimal di Sulawesi Selatan dengan terbuka atau transparan. PKI hanya melakukan propaganda secara terselubung dengan melakukan pertemuan-pertemuan.

Meskipun sebelumnya pemerintah telah melakukan pengawasan, tetapi kegiatan-kegiatan PKI tetap berjalan dengan baik. PKI. Dalam setiap kegiatannya harus melaporkan kepada

Kepala Daerah atau Bupati atau Walikota setempat mulai tanggal 27 Agustus 1960 (Arsip Kab. Enrekang, Reg. 201). Berdasarkan kondisi tersebut maka jalur yang ditempuh oleh PKI lebih cenderung jalur kanan dibanding jalur kiri. Melalui jalur tersebut, PKI melakukan penyusupan dalam setiap instansi pendidikan pemerintah maupun instansi pendidikan swasta. (Arsip Kab. Sinjai Reg. 53). Satu hal yang paling sering diperjuangkan oleh PKI dan diterima oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan yakni adanya himbauan untuk pembebasan rakyat dari penderitaan. Masyarakat yang berada dalam kemiskinan merasa bahwa apa yang diperjuangkan oleh PKI memang sepatasnya dilakukan dan menjadi materi propagandanya (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 175). Sementara partai-partai lain tidak menunjukkan ketegasannya.

4. Land Reform dan Aksi Sepihak

Tahun 1960, pemerintah Indonesia memberlakukan UUPA No. 5 Tahun 1960. Undang-undang ini dimaksudkan untuk membenahi struktur kepemilikan tanah dan penguasaan tanah masih timpang. Presiden Sukarno membuat kebijakan untuk penataan agraria, suatu kebijakan yang dikenal sangat populis dan nasionalis (Mustain, 2007: 15) Ketimpangan agraria dapat dilihat berdasarkan data pertanahan tahun 1957 memperlihatkan bahwa rata-rata petani di Indonesia memiliki tanah pertanian seluas 0,5 hektar dan petani di Sulawesi dan Nusa Tenggara memiliki tanah pertanian seluas 0,8 hektar (Faryadi, 2008). Kenyataan ketimpangan struktur agraria semacam inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjalankan program *land reform*.

Bersamaan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), diberlakukan pula Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH), yang mengatur soal pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan petani penggarap. Kedua undang-undang ini merupakan

keberhasilan PKI dalam politik nasional. Pemerintah pusat merencanakan penataan agraria selama satu tahun setelah UUPA disahkan. Oleh karena tidak menjadi kenyataan maka pemerintah pusat menundanya sampai tahun 1963. Usaha pemerintah ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Justru, penerapan undang-undang ini di daerah sangat kacau (Hermawan, 2010: 134). *Land reform* gagal diterapkan karena mendapat hambatan-hambatan; pertama, adanya administrasi tanah yang tidak sempurna, mengakibatkan sukarnya mengetahui secara tepat luas tanah yang akan dibagikan dalam *land reform*. Kedua, ada orang-orang yang belum menyadari pentingnya *land reform* bagi penyelesaian revolusi sehingga muncul tindakan merintang *land reform*, dan ketiga, adanya tekanan-tekanan psikologis dan ekonomis dari tuan-tuan tanah kepada para petani. (Kasdi, 2001). Dari hambatan ini muncul aksi sepihak (*unilateral action*) yang menjadi pusat persengketaan karena berbenturan dengan pihak tuan tanah. Aksi sepihak PKI di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari ketidaksabaran BTI dan menerapkan UUPA.

Aksi sepihak PKI mendorong munculnya perselisihan antara tuan tanah dan petani penggarap. Di Sulawesi Selatan, aksi PKI melalui BTI memelopori penerapan Undang-undang tersebut dengan melakukan gerakan pembagian tanah kepada petani. Aksi PKI ini selain sebagai respon konstitusi UUPA juga sebagai upaya memenuhi janji-janji politiknya. Patokan dasar pengambilalihan tanah untuk petani adalah pasal 7 dalam UUPA dinyatakan bahwa "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 9 ayat (2) bahwa "tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".

Aksi PKI menuai kontra dari berbagai pihak, utamanya kaum bangsawan dan tuan-tuan tanah di Makassar.

Akan tetapi, tidak semua aksi pembagian tanah kepada petani dicerminkan oleh semangat *land reform*. Beberapa kasus di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa pembagian tanah dilakukan oleh penguasa-penguasa desa yang sudah mapan. Misalnya, bangsawan sekaligus kepala desa, telah lama memiliki kekuasaan dan masyarakat cenderung tunduk atas kebijakannya. Tanah-tanah yang tidak digarap karena ditinggal pemilikinya pada saat intensifnya Gerakan DI/TII, diambilalih dan dikuasai oleh kepala desa. Sang penguasa desa yang kebetulan pro ataukah hanya sikap oportunist terhadap aksi PKI melakukan pembagian tanah kepada petani. Namun, sebagian petani menolak dengan alasan bukan haknya atau khawatir akan menimbulkan pertengkaran. Tanah-tanah yang tadinya tidak bertuan ditinggal pemilikinya, yang semestinya diserahkan kepada petani miskin dikuasai oleh kepala desa. Sehingga penguasa desa di Kabupaten Bone pada tahun 1960-an sebagian besar memiliki tanah yang luas.

Isu *land reform* dipakai oleh PKI untuk mempolarisasikan penduduk desa menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu, tuan tanah “setan desa” dan petani. *Land reform* menimbulkan pertentangan atau konflik di desa dan memperkuat persekutuan-persekutuan menurut garis-garis hubungan kepartaian. Konflik ini tidak saja menyangkut distribusi tanah tetapi juga kekuasaan yang harus melaksanakan distribusi itu. Dari sinilah aksi-aksi PKI sangat radikal merongrong kewibawaan pemerintah di tingkat lokal dimana pelaksanaan *land reform* digalakkan. Di tingkat yang paling sensitif, PKI berbenturan dengan tokoh-tokoh masyarakat agama (ulama) yang selama ini memegang peranan penting dalam masyarakat. Menjelang peristiwa Gerakan 30 September meletus, K.H Abdul Rahman Ambo Dalle, secara terang-

terangan menyatakan kekecewaan dan kemarahannya terhadap PKI yang telah menebarkan intrik-intrik dan fitnah serta mendorong munculnya pertentangan dalam masyarakat (Amal, 2003: 213). Pesantren *Darul Dakwah wal Irsyad* (DDI) melakukan kegiatan menempa santri-santrinya untuk mengatasi aksi-aksi dan teror PKI, serta mewajibkan warga DDI untuk melawannya.

Berbagai aksi PKI dan ormas-ormasnya yang telah disinggung di atas menimbulkan sikap yang kurang baik dari berbagai kelompok yang merasa dirugikan. Pengerahan massa dan retorika politik kiri menimbulkan musuh-musuh PKI yang diam atau tidak tampak. Aktivis organisasi-organisasi dari Partai Masyumi yang telah dilarang pemerintah menaruh dendam terhadap PKI yang selama ini mendukung pelarangan Masyumi. Mereka umumnya menggabung diri dalam organisasi Syarikat Buruh lain seperti SARBU MUSI (NU). Akibatnya, perpecahan masyarakat dalam bentuk aliran politik-ideologi menjadi lebih meningkat. Mencermati perkembangan politik pada tahun 1960-an memang menggambarkan akan terjadi sebuah revolusi sosial. “Situasi ibukota pertiwi sedang hamil, akan melahirkan sebuah revolusi”.

Terlepas munculnya musuh-musuh baru PKI sebagai akibat dari aksi sepihak dalam rangka reformasi agraria, PKI juga telah berhasil membangun basis massa petani yang cukup banyak serta semakin meningkat cepat sejak tahun 1960. PKI telah berhasil mendirikan organisasi petani dan organisasi sosial lainnya di daerah tingkat kabupaten. Arah perkembangan PKI dari kota ke desa memperlihatkan gejala menaik. Jumlah anggota PKI mencapai sekitar 10.000 orang (Bigalke, 2005: 267). Jumlah ini jauh meningkat dibanding dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, sejak berakhirnya DI/TII Kahar Muzakkar dan Permesta, PKI dengan cepat menemukan ritmenya.

Akan tetapi perkembangan PKI di Sulawesi Selatan tidak dapat bertahan lama seiring dengan meletusnya Gerakan 30 September 1965, di mana PKI menjadi kelompok yang dituduh paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Akibatnya menjadi sasaran kemarahan massa. Di Sulawesi Selatan, musuh-musuh PKI yang telah lama mengakar bangkit kembali sehingga kekerasan sepanjang akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966 tidak dapat dihindari. Perjalanan politik PKI mengalami kehancuran dan sebagian besar simpatisannya ditangkap.

D. PENUTUP

Perkembangan PKI di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari situasi politik, ekonomi dan keamanan regional Sulawesi Selatan. Munculnya gerakan DI/TII dan Permesta memengaruhi perkembangan PKI. Di daerah pedalaman Sulawesi Selatan PKI tidak dapat berkembang karena mendapat sandungan dari gerakan DI/TII yang mengkampanyekan anti PKI. Sementara Permesta yang dipimpin oleh perwira militer dan mendapat dukungan kalangan elit/bangsawan memiliki visi pembangunan yang anti PKI. Akibatnya, PKI gagal mengais suara di wilayah Sulawesi Selatan pada pemilu 1955. Setelah DI/TII dan Permesta berhasil ditumpas, PKI mulai bangkit dan mendapatkan momentum memperjuangkan hak petani untuk mendapatkan tanah. Setelah disahkan Undang-Undang Pokok Agraria perjuangan PKI semakin meningkatkan intensitasnya. Akan tetapi, PKI mendapat tantangan besar mengingat Sulawesi Selatan memiliki hirarki sosial yang kuat di mana bangsawan dan militer adalah kelompok yang mendominasi penguasaan tanah. Popularitas PKI di mata petani semakin membaik menjelang tahun 1965, namun juga semakin memperlihatkan antipati militer dan bangsawan terhadap PKI. Sebuah kondisi yang mengawali sebelum PKI menghadapi

kehancurannya sebagai rembesan dari gerakan 30 September 1965.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar atas izin penelitian yang pada akhirnya menghasilkan artikel ini. Kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan atas bantuan untuk mengakses arsip pemerintahan di Sulawesi Selatan tahun 1950-60-an. Kepada Lembaga Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR Makassar) atas bantuan data, diskusi yang mendalam berkenaan dengan fokus penelitian. Kepada bapak Latif Yusmanor, Anwar Abbas dan aktivis angkatn 65 di Sulawesi Selatan atas informasi dan diskusi-dikusi yang larut tentang perkembangan politik lokal pada tahun 1950-60-an.

DAFTAR SUMBER

1. Arsip

Arsip Kabupaten Bone
 Arsip Kabupaten Enrekang
 Arsip Kabupaten Sinjai
 Arsip Kotamadya Ujung Pandang
 Arsip Muhammad Saleh Lahade
 Arsip Provinsi Sulawesi

2. Buku, Artikel

- Ahmad, Taufik. 2009.
Kamp Pengasingan Moncongloe,
 Jakarta: Desantara.
- _____. 2012.
 South Sulawesi: The Military, Prison
 Camps and Forced Labour dalam
 Douglas Kammed dan Katharine Mc
 Gregor (ed) *The Contours of Mass
 Violence in Indonesia, 1965-68*,
 Singapore: NUS Press.
- Amal, Taufik Adnan. 2003.
 Gurutta K.H. Abdul Rahman Ambo
 Dalle” (c.1900-1996) Ulama Besar dari
 Tanah Bugis” dalam Jajat Burhanuddin
 (ed) *Transformasi Otoritas Keagamaan:
 Pengalaman Islam di Indonesia*,
 Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Bigaleke, Terence William. 2005.
Tana Toraja: A Sosial History of an Indonesian People, Singapore: Singapore University Press.
- Faryadi, Erpan.
Sebab-sebab Melatarbelakangi Keterlibatan Kaum Tani dalam Politik Land Reform” *Makalah* disampaikan pada Konferensi INFID ke 15 tanggal 27-28 Oktober, 2008.
- Gonggong, Anhar. 2004.
Abdul Kahar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, Yogyakarta: Ombak.
- Hamid, Abd. Rahman. 2008.
Qahar Muzakkar di Persimpangan Jalan, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Harvey, Barbara Sillars. 1983.
Permesta: Pemberontakan Setengah Hati, Jakarta: Grafiti Press.
- _____. 1989.
Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII. Jakarta: Grafiti Press.
- Kasdi, Aminuddin. 2001.
Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965. Yogyakarta: Jendela.
- Krisnadi. 2000.
Tahanan Politik di Pulau Buru 1969-1979, Jakarta: LP3S.
- Leirissa, R.Z. 1997.
Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis. Jakarta: Grafiti.
- Mustain. 2007.
Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. Jakarta: Ar-Ruz Media.
- Muzakkar, Abdul Qahar. 1999.
Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia. Jakarta: Madina Press.
- Ricklefs, M.C. 2008.
Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.
- Subhan. 1996.
Langkah Merah. Yogyakarta: Benteng
- Budaya Sulisty, Hermawan. 2000.
Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan. Jakarta: Gramedia.
- Velthoen, Esther. 2011.
“Memetakan Sulawesi Tahun 1950-an” dalam Sita Van Bemmelen dan Remco Raben (Ed) *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

3. Surat Kabar

Harian Rakjat, 6 Maret 1956

Harian Rakyat, 10 September 1958

Harian Rakyat, 21 September 1954

Warta Pia, 14 Maret 1957

4. Sumber Lisan/Informan

Idrus Husein (70 Tahun). 2009.

Eks Aktivistis Pemuda Ansor 1965 dan Pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, *Wawancara*, Watampone, 20 Agustus 2009.

Latif Yusmanor (73 Tahun). 2009.

Eks Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Polewali Mandar, 12 Juli 2009.

Anwar Abbas (70 Tahun). 2009.

Eks Aktivitas Pemuda Rakyat Tahun 1965 (Eks Tapol PKI), *Wawancara*, Makassar, 10 Juni 2009.